KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Impor BBM lewat BLU Lemigas, komisi XII: putus praktik mafia migas
Tanggal : Selasa, 03 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Impor BBM Lewat BLU Lemigas

Komisi XII: Putus Praktik Mafia Migas


FOTO: IG PRIBADI

Ateng Sutisna

SENAYAN mendukung perubahan skema pengadaan impor minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan elpiji melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. Pemerintah diingatkan agar kebijakan baru tersebut benar-benar dapat memutus praktik mafia minyak dan gas (migas).

Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna mengatakan, perubahan jalur pengadaan tidak otomatis menghilangkan mafia migas. Pemerintah perlu memastikan pemasoknya jelas, harga pengadaannya wajar, biaya perantaranya dapat diperiksa, dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan melalui intervensi. "Jangan sampai yang berubah hanya pintu masuknya, sementara praktik rentenya tetap berjalan," tegas Ateng di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Sebelumnya, Pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM dan elpiji melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang diumumkan pada 26 Oktober 2026. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah menyiapkan skema pengadaan antarpemerintah dan Pemerintah dengan badan usaha dengan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan sebagai pelaksana pengadaan. Adapun BLU yang mendapatkan mandatory adalah Lemigas. Selanjutnya, PT Pertamina membeli komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Ateng melanjutkan, perubahan tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah persaingan pasar energi global. Selama ini, proses tender menghadapi kendala ketika pemasok mengalihkan pasokan kepada pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi, meskipun Pertamina telah memenangkan tender. "Negosiasi langsung diharapkan dapat meningkatkan kepastian pasokan dan memperkuat posisi negara dalam menentukan mitra pengadaan," tandas politisi PKS ini.

Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari hilangnya tahapan tender konvensional. Pengawasan perlu memastikan setiap keputusan pembelian bebas dari konflik kepentingan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi negara.

Ia mengingatkan, pengalaman pembenahan tata niaga migas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo perlu menjadi pelajaran. Pembentukan *Integrated Supply Chain* (ISC) pernah menjadi bagian dari upaya mengubah tata kelola pengadaan, sedangkan penghentian operasi Petral pada 2015 merupakan langkah penting.

Namun, beber Ateng, pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 oleh Kejaksaan Agung menunjukkan perlunya pengawasan berkelanjutan. ■ TIF